

Vol. VI/No. 3/September 2011

ISSN: 0126-4605

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI



**Hasil Monitoring
UN 2011**

**Hasil Penilaian Buku
Teks Pelajaran Tahap I**

Berita BSNP:
**Balitbang dan BSNP Bersinergi
dalam Pelaksanaan Kegiatan**

Penanggungjawab
Moehammad Aman Wirakartakusumah

Pemimpin Redaksi
Edy Tri Baskoro

Redaksi Eksekutif
Weinata Sairin
Richardus Eko Indrajit

Dewan Redaksi
Djaali
Djemari Mardapi
Farid Anfasa Moeloek
Furqon
Gunawan Indrayanto
Jamaris Jamna
Johannes Gunawan
Mungin Eddy Wibowo
Teuku Ramli Zakaria
Zaki Baridwan

Redaksi Pelaksana
Bambang Suryadi

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih

Reporter
Gaguk Margono
Kaharuddin Arafah

Kuangan
Neneng Tresnaningsih
Rosmalina

Distribusi/Sirkulasi
Nurul Najmah
Djuandi
Reyman Aryo
Ibar Warsita

Alamat:
BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2,
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591

Email: info@bsnp-indonesia.org
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Dari Redaksi

Pembaca yang budiman. Puji dan syukur bagi Allah karena hanya dengan pertolongan dan inayahNya lah, Buletin BSNP edisi ketiga tahun 2011 terbit dan hadir di tangan pembaca sesuai dengan yang direncanakan. Mulai edisi ketiga ini kami paparkan secara bersambung artikel tentang paradigma pendidikan nasional abad XXI. Hal ini dimaksudkan untuk sosialisasi tentang pokok-pokok pemikiran yang termuat dalam paradigma pendidikan nasional abad XXI tersebut. Edisi ini juga memuat dua artikel lainnya yaitu hasil monitoring UN 2011 dan perkembangan penyusunan standar pendidikan nasional. Selain itu, edisi ketiga ini juga dilengkapi dengan kegiatan BSNP dalam bentuk gambar/lensa kegiatan selama tiga bulan terakhir. Selamat membaca.

Daftar Isi

3-6	Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI
7-10	Hasil Monitoring UN 2011
11-14	Perkembangan Penyusunan Standar Nasional Pendidikan
15-18	Berita BSNP: - Balitbang dan BSNP Bersinergis dalam Pelaksanaan Kegiatan - Hasil Penilaian Buku Teks Pelajaran Tahap I - Validasi Draf Standar Sarana dan Prasarana Program Pascasarjana dan Profesi - Evaluasi Pelaksanaan UN di Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan - Pemantauan Pelaksanaan UNPP
19-20	Lensa BSNP

Keterangan Gambar Cover

Suasana reviu draf standar sarana dan prasarana program pascasarjana dan profesi pendidikan tinggi di Surabaya (atas). Siswa SMAN 1 Indralaya Palembang menunggu di depan ruang ujian sebelum ujian dimulai dengan penuh ceria karena mereka telah belajar dengan tekun dan giat

PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI

(Bagian I)

Mulai edisi ketiga tahun 2011, Buletin BSNP secara bersambung akan memaparkan tulisan tentang paradigma pendidikan nasional abad XXI yang disusun oleh tim ahli sebanyak dua belas orang dan dikoordinasikan oleh Farid Afansa Moeloek bersama enam anggota BSNP lainnya pada tahun 2010. Pemuatan tulisan ini dimaksudkan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi tentang paradigma pendidikan nasional abad XXI tersebut. Selamat membaca (bagian pertama) dan semoga bermanfaat.

PENGANTAR

Tim Ahli Penyusun Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI yang bekerja di bawah naungan Badan Standar Nasional Pendidikan, mempersembahkan dokumen ini ke hadapan khalayak. Usaha menyusun Paradigma Pendidikan Nasional abad XXI ini adalah dalam usaha memenuhi amanat yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dan didasarkan pada Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang setara dengan bangsa-bangsa lain, sambil menghadapi perubahan drastis abad XXI yang melanda seluruh dunia. Kemajuan global, yang ditandai dengan semakin deras pengaruh budaya lain menerobos batas-batas negara yang ditentukan secara geografis konvensional, harus dihadapi. Tatanan dunia abad XX yang dibatasi oleh sekat-sekat ideologis, dalam abad XXI ini dibatasi oleh sekat yang diakibatkan oleh kesenjangan penguasaan sains dan teknologi. Demi kejayaan nasional, penghapusan sekat ini harus dilaksanakan dengan program sistematis dan strategis, untuk mendorong bangsa Indonesia untuk maju dan lebih mandiri.

Alir politik dan budaya melaju merambah batasan sosial apa pun sebagai hentakan eksternal yang berupa desakan yang memaksa. Laju aliran ini hanya dapat dikendalikan dengan potensi kuat kita dalam aspek tersebut. Ibarat air yang mengalir dari tempat berpotensi tinggi ke tempat yang rendah, begitu pula budaya, sains dan teknologi akan mengisi kantong sosial yang berpotensi kurang. Hukum itu juga akan mempengaruhi hidup kita jika kita biarkan gradien potensial tetap bekerja menurut hukum alam. Itulah sebabnya daya tahan kebangsaan harus diperkuat dengan pengisian elemen teknologi dan sains. Kedua cabang budaya yang telah merebak semenjak akhir abad XIX itu memancarkan kekhasan dan kewibawaan yang akan lebih tampak merambah masa datang. Kita tidak anti asing atau budaya lain, tetapi kita ingin membangun ketegaran berbangsa agar dapat memilih dan memilah aktif kukuran budaya lain untuk kita luhurkan menjadi bagian dari kemajuan kita.

Bila melihat ke depan dan mengejar kemajuan, mau tidak mau perhatian kita harus tertuju pada peningkatan mutu anak bangsa melalui pendidikan. Anak bangsa tidak boleh terpinggirkan oleh arus kemajuan. Pendidikan yang bermakna harus menjadi strategi dasar dalam gerak menjauhkan bangsa Indonesia dari lembah ketertinggalan untuk menyamai dunia maju. Inti pendidikan itu ialah mengacu dengan tepat pada keseimbangan pendidikan keilmuan dan usaha memajukan ilmu pengetahuan dengan pendidikan yang memperbesar kapasitas nuraniah yang menyangkut moral. Tanggung jawab kita secara pedagogik adalah membimbing anak bangsa untuk menjadi pribadi dengan kecerdasan akal dan kemuliaan karakter yang seimbang.

Selama penyusunan itu Tim telah dipimpin oleh Pancasila sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 dan oleh kekokohan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tim juga menyadari kehadiran semua usaha legal yang terukir dalam bentuk hukum yang menjadi rambu-rambu pendidikan di Indonesia setelah

Proklamasi Kemerdekaan sampai tahun 2010. Dokumen itu merupakan petunjuk dan keinginan nyata bangsa Indonesia untuk maju. Tim memperhatikan agar kita tidak salah langkah terjerumus ke dalam lingkaran tak berujung kemandirian, namun pumpunan perhatian Tim tidak dapat lain kecuali menerawang ke masa depan mencari jalan bangsa agar memperoleh kehormatan di antara bangsa di dunia karena sumbang pikir nurani dan akal kita kedalam khazanah budaya yang ikut memperkokoh sosok bangsa dalam ikut menghadirkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian kemanusiaan. Anak bangsa adalah individu dengan kekhasannya sendiri-sendiri. Kita harus dapat menjadikannya modal untuk kebersamaan membangun profil ke-Indonesia-an. Kepada merekalah kita tumpahkan perhatian, energi dan dana agar tiap individu dapat menjadi aset bangsa yang berkarakter pembaharu, berkeinginan tahu, terdorong menjadi penemu berdaya cipta, menghargai kebebasan berpikir, dan menghormati keaneka ragam kultural. Tim mengetengahkan unsur kognitif, nilai kognitif, dan sikap etis, serta santun dalam bersosialisasi. Nilai tambah itu terselenggara dalam ranah pendidikan formal, non-formal dan in-formal yang dilaksanakan dengan keyakinan mengingat kefungsian negara dan masyarakat. Kesetaraan bagi semua anak bangsa harus terbangun tanpa memandang keragaman warna kulit, asal ras, agama, maupun kepercayaan.

Dalam mengemukakan pendapat yang tersaji di dalam buku ini Tim tidak berpretensi melihat seluruh terowongan abad XXI, karena sadar bahwa perubahan dan dadakan dapat terjadi karena penemuan teknologi yang mencuat, ilmu pengetahuan yang mengubah paradigma, kondisi sosial yang berubah dan ekonomi yang menuntun kehidupan. Namun begitu Tim tidak dapat melihat lain kecuali tekno-sains akan memimpin gerak kehidupan selama beberapa dekade mendatang. Tekno-sains ini akan mendorong dan mengarahkan, bahkan, dalam berbagai hal akan menguasai ingatan dan kemampuan masyarakat. Tekno-sains mengemban pengertian luas dan untuk memiliki dan mengantisipasinya masyarakat harus pro-aktif menguasainya tanpa menanggalkan aspek sosio-budaya bangsa. Kecenderungan dunia dewasa ini, nyatanya, ingin mengembangkan "*knowledge-based economy*" sebagai sarana mensejahterakan

masyarakat. Ini merupakan pencanangan bahwa ilmu pengetahuan akan menjadi pijakan guna memajukan bangsa dalam percaturan dunia.

Selain ingin menyikapi tantangan eksternal, yakni mendudukkan harkat bangsa setara dengan bangsa lain di dunia maju, Tim juga meyakini perlunya menanam pancang pendidikan yang lebih kokoh agar di atas basis itulah potensi anak bangsa dipersatukan. Anak bangsa yang terdiri dari aneka ras, berbagai suku bangsa dengan pelbagai adat dan kepercayaannya, serta beraneka agama, hendaknya terikat bersama dalam semangat kebangsaan. Dengan kebersamaan ini mereka menyongsong masyarakat jamak yang bertali-temali lebih luwes dan indah, karena toleransi terhadap keanekaragaman. Ini adalah pengejawantahan Tim pada amanah konstitusi yang meminta kita menghormati setiap orang tanpa membedakan golongan atau untuk kepentingannya sendiri. Tim juga tidak ingin melihat adanya kelompok terpinggirkan tak tersentuh oleh arus utama pendidikan dan usaha yang bertujuan mengangkat manusia sebagai pribadi dan manusia anggota masyarakatnya. Oleh karena itu disadari adanya keanekaragaman geo-demografis dan gender, sehingga kedua aspek sosial ini harus selalu masuk ke dalam persamaan yang mencerminkan kemajuan berbangsa. Naluri hidup berkelanjutan, dengan memikirkan kesejahteraan generasi berikutnya, kemandirian dalam penyelenggaraan hidup serta kejujuran merupakan nilai ajar yang inheren dengan program strategik yang mengusung misi dasar pembentukan anggota masyarakat yang mencintai dan, lebih dari itu, mensyukuri, keberadaan tanah air yang bebas berpolitik, bangga mengembangkan seni dan budaya serta berkemampuan mengelola sumber alamnya untuk kemaslahatan bangsa di masa depan.

Dengan wawasan tersebut pokok pikiran Tim disampaikan dalam lima bab seperti di bawah ini.

Bab I menyajikan aras pendidikan dalam wujud pengertian dasar, falsafah dan paradigmanya.

Bab II menunjukkan bahwa semenjak pra penjajahan pendidikan di Indonesia telah memiliki makna yang mengajak peserta didik untuk mandiri dan membebaskan diri dari ketidaktahuan. Dikemukakan pula bagaimana paradigma pendidikan yang dimiliki sampai saat

ini, beserta beberapa catatan mengenai pendidikan kita, dampak geo-demografis serta tantangan bagi pendidikan nasional.

Bab III menguraikan karakteristik, kompleksitas, tantangan serta teknologi dan budaya abad XXI. Dikemukakan pula pembinaan budaya dan karakter bangsa sebagai suatu tantangan nasional.

Bab IV dimulai dengan penjelasan tentang konteks pengembangan paradigma pendidikan nasional, tujuan pendidikan, diikuti dengan paradigma pendidikan nasional abad XXI. Bab ini diakhiri dengan mengemukakan bagaimana kualifikasi SDM abad XXI yang dikehendaki.

Bab V mengemukakan deskripsi sejumlah ciri model pendidikan yang perlu dicermati setelah mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan paradigma tersebut. Ditunjukkan pula berbagai pergeseran paradigma pendidikan yang mungkin terjadi, dan diakhiri dengan strategi pengambilan kebijakan yang mencakup strategi pelaksanaan operasional.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Pendidikan

Ide dasar pendidikan itu adalah kerja membangun manusia supaya dia bisa *survive* melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar-manusia, serta antara manusia dengan Tuhan. Melalui pendidikan terjadi proses di mana suatu kompleks pengetahuan dan kecakapan (*capacities*) diteruskan kepada generasi selanjutnya. Setiap generasi baru pada gilirannya akan menggali dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru yang diperlukannya untuk merespon dan mengatasi tantangan yang tidak dikenal lewat pendidikan pengetahuan dan kecakapan terdahulu.

- a. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyumbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin karakter),

pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisahkan, agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak didik selaras dengan dunianya.

Berdasarkan UU 20/2003 fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU 20/2003, pasal 3). Pendidikan dengan demikian pada dasarnya merupakan sarana proses humanisasi, proses pemberdayaan, dan sosialisasi, dalam kerangka mana terjadi proses pembangunan manusia yang inovatif, berdaya kritik, berpengetahuan, berkepribadian, dan taat azas (Zainuddin, 2010).

Dalam konteks globalisasi, pendidikan harus mampu mempertahankan budaya dan jati diri bangsa di tengah-tengah gempuran beragam budaya dan peradaban bangsa lain. Sebagai sebuah negara yang kaya akan budaya yang beraneka ragam (heterogen), Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang mandiri dalam arti sanggup memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, cita-cita, dan impiannya.

1.2. Falsafah Pendidikan

Pemahaman mengenai pendidikan itu berubah dari waktu ke waktu serta dari pendidik yang satu ke pendidik yang lain.

Kendati demikian, pendidikan itu pada dasarnya bisa dipahami sebagai proses, di mana pendidik melakukan transfer pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai kepada peserta didik dalam suatu proses pembentukan kemampuan fisik (yang sehat), kemampuan nalar (yang cerdas) maupun karakter (yang utama), melalui suatu proses yang merupakan upaya sosialisasi dan enkulturasi yang terlembaga, baik dalam ranah formal, non formal, dan informal.

Dalam kerangka konsep Ki Hajar Dewantara pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh

berkembang, menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif).

Ki Hajar Dewantara juga meninggalkan pesan mengenai jangkauan pendidikan yang siap bahkan untuk masa depan, hampir seabad yang lalu: “pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk menjadi merdeka dan independen secara fisik, mental dan spiritual; pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan dari orang kebanyakan; pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan; pendidikan hendaknya memperkuat rasa percaya diri, mengembangkan harga diri. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang.”

Masih sezaman dengan Ki Hajar Dewantara, Engkoe Mohammad Sjafei yang mendirikan “Perguruan Ruang Pendidik INS Kayutanam” pada tahun 1926 di desa Kayutanam di Sumatra Barat juga memandang pendidikan sebagai upaya dan proses pembangunan manusia yang lengkap. Dalam rangka itu Engkoe Mohammad Sjafei mengajukan lima sasaran utama dari upaya pendidikan, yaitu: (a) kemerdekaan berpikir (dalam bentuk inovasi/kreativitas), (b) pengembangan ilmu pengetahuan, talenta/bakat (sebagai rahmat Tuhan), dan potensi diri, (c) kemandirian dan *entrepreneurship*, (d) etos kerja, serta (e) akhlak mulia (sebagai pengejawantahan dari agama, etika, dan estetika).

1.3. Paradigma Pendidikan

Thomas Kuhn (1922-1996) adalah orang pertama yang merumuskan paradigma ilmu dalam disiplin epistemologi sebagai kerangka teoritis,¹ atau suatu cara memandang dan memahami alam, yang telah digunakan oleh komunitas ilmuwan sebagai pandangan dunianya. Paradigma

ilmu ini berfungsi sebagai lensa, sehingga melalui lensa ini para ilmuwan dapat mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dalam bidang masing-masing dan jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah tersebut.

Paradigma diartikan sebagai alam disiplin intelektual, yaitu cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas pada sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual.

Dengan pengertian-pengertian di atas, Paradigma Pendidikan dan Paradigma Pendidikan Nasional dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

“Paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut.”

“Paradigma pendidikan nasional adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan nasional, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan nasional, dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut.”

Ke dalam cara pandang itu termasuk tantangan dasar yang dihadapi manusia dalam kaitannya dengan tata sosial, kebudayaan serta lingkungan alamnya.

Konsep paradigma Pendidikan Nasional yang disusun di sini akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan serta pelaksanaannya, dan melibatkan pula penentuan persyaratan pelaksanaannya. Dalam mengacu ke masa depan, pelaksanaan pendidikan perlu memperhitungkan pengaruh dari berbagai sumber belajar, termasuk yang berkembang di dunia maya. Paradigma pendidikan nasional yang dirumuskan di sini, didasarkan pada tujuan, dan yang diharapkan dari hasil pendidikan kita yang akan datang. Hal ini akan diuraikan dalam bagian tersendiri. (bersambung)

1 *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press, ([1962] 1970).

Hasil Monitoring UN 2011

Bambang Suryadi

Staf Profesional BSNP, Dosen Fakultas psikologi UIN Jakarta

Pengantar

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen memiliki wewenang menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) SMA/MA, SMALB, SMK, SMP/MTs, dan SMPLB serta Ujian Nasional SD/MI tahun pelajaran 2010/2011.

UN Utama SMA/MA, SMALB dan SMK dilaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan 21 April 2011. UN Susulan dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 28 April 2011. Pengumuman hasil UN tanggal 16 Mei 2011. UN Utama SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 28 April 2011. UN Susulan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai dengan 6 Mei 2011. Pengumuman hasil UN tanggal 4 Juni 2011. UN Utama SD/MI dan SDLB dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2011. UN Susulan dilaksanakan dari tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2011. Pengumuman hasil UN minggu ketiga bulan Juni 2011.

Jumlah peserta UN tahun pelajaran 2010/2011 sebanyak 10.660.312 peserta dari 234.342 sekolah/madrasah untuk seluruh jenjang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1
Peserta Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011

No	Jenjang	Jumlah Sekolah/ Madrasah	Jumlah Peserta
1	SMA/MA, SMK dan SMALB	25.656	2.488.757
2	SMP/MTs dan SMPLB	47.369	3.768.722
3	SD/MI dan SDLB	161.317	4.402.839
	Total	234.342	10.660.312

Dalam penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2010/2011 terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan UN tahun sebelumnya. Perbedaan pertama, kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan dengan formula gabungan, yaitu 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai sekolah/madrasah yang

merupakan gabungan dari 60 persen nilai ujian sekolah dan 40 persen nilai rapor.

Kedua, pada tahun ini tidak ada UN Ulangan bagi siswa yang tidak lulus UN Utama dan UN Susulan. Hal ini karena berdasarkan evaluasi penyelenggaraan UN tahun sebelumnya, penyelenggaraan UN Ulangan kurang efektif.

Ketiga, khusus untuk UN SMA/MA, BSNP melakukan uji petik di sekolah/madrasah tertentu. Dalam pelaksanaannya, anggota BSNP membawa lembar jawaban dari ruang ujian ke perguruan tinggi koordinator pengawasan UN untuk dipindai (scan). Hasil pemindaian dibawa langsung ke Jakarta untuk dilakukan analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang obyektif jika UN diselenggarakan dengan jujur dan transparan.

Untuk memastikan penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2010/2011 sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang UN, maka BSNP melakukan pemantauan penyelenggaraan UN.

Metode

Mengingat keterbatasan anggota BSNP, kegiatan pemantauan UN ini dilaksanakan selain melibatkan anggota BSNP juga melibatkan Biro Hukum, Inspektorat Jenderal, dan Puspendik dengan mengunjungi sekolah/madrasah penyelenggara UN. Selain itu kegiatan pemantauan juga dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP, SMA, dan SMK Kementerian Pendidikan Nasional.

Sekolah/madrasah yang dipantau dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan jenis sekolah/madrasah, status negeri/swasta dan lokasi sekolah di kabupaten/kota. Sedangkan kuesioner diberikan kepada penyelenggara tingkat provinsi, penyelenggara tingkat kabupaten/kota, penyelenggara tingkat satuan pendidikan, guru, dan murid.

Pemantauan dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan angket. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan konkrit tentang penyelenggaraan UN. Obyek yang diobservasi adalah satuan pendidikan penyelenggara UN, diantaranya ruang kelas, kondisi siswa, tempat penyimpanan



Siswa SMA menghadapi Ujian Nasional pada hari pertama dengan penuh ceria dan percaya diri. Percaya diri merupakan kunci utama menuju sukses dalam setiap urusan termasuk UN.

soal, pengawasan UN di ruang ujian, dan kebersihan lingkungan. Wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada penyelenggara UN tingkat provinsi, kabupaten/kota, kepala sekolah, guru, dan peserta UN. Angket digunakan untuk mendapatkan pandangan siswa, guru, dan penyelenggara tentang penyelenggaraan UN. Beberapa hal yang ditanyakan dalam angket adalah persiapan menjelang UN, tingkat kesulitan soal untuk masing-masing pelajaran, dan dampak psikologis UN terhadap semangat belajar dan mengajar murid dan guru.

Responden pemantauan terdiri atas beberapa unsur, yaitu (a) Penyelenggara UN tingkat provinsi (1 orang); (b) Penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota (1 orang); (c) Penyelenggara UN tingkat satuan pendidikan (3 orang dari 3 satuan pendidikan); (d) Guru (5 orang setiap satuan pendidikan); dan (e) Peserta UN (10 anak setiap satuan pendidikan)

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dalam rentang waktu pelaksanaan UN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan BSNP. Pemantau berada di lapangan selama tiga hari. Pemantauan dilaksanakan di 33 provinsi, di masing-masing provinsi pemantauan dilakukan di dua sampai tiga kabupaten/kota, dan di setiap kabupaten/kota sebanyak tiga sampai empat sekolah/madrasah.

Hasil

Hasil pemantauan secara umum dapat diklasifikasikan kepada tiga aspek, yaitu persiapan siswa menghadapi UN, dampak UN terhadap siswa dan guru, dan tingkat kesukaran soal UN. Hasil tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Data di atas menunjukkan bahwa

Tabel 2
Persiapan Siswa SMA/MA Menghadapi UN
N = 481

No.	PERSIAPAN	JUMLAH
1	Mengikuti pelajaran tambahan di sekolah/madrasah	443 92%
2	Mengikuti bimbingan belajar	373 78%
3	Membeli buku pelajaran yang diujikan	438 91%
4	Menambah jam belajar	449 93%

peserta UN bersungguh-sungguh melakukan persiapan melalui berbagai usaha. Mayoritas peserta didik menambah jam belajar (93%), mengikuti pelajaran tambahan di sekolah/madrasah (92%), dan membeli buku pelajaran yang diujikan dalam UN (91%). Namun demikian meskipun mereka sudah mengikuti pelajaran tambahan dan menambah jam belajar, masih ada 78% dari peserta didik yang mengikuti bimbingan belajar. Ketika mereka ditanya mengapa masih mengikuti bimbingan belajar, mayoritas responden mengatakan

untuk lebih percaya diri. Secara singkat dapat dikatakan bahwa usaha dan kerja keras yang dilakukan peserta didik ini dimaksudkan untuk lulus UN.

UN memiliki pengaruh psikologis terhadap murid dan guru dalam belajar mengajar sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Data pada tabel 3 di atas menunjukkan

Table 3
Dampak UN Terhadap Siswa Dan Guru SMA/MA

NO.	DAMPAK	SKALA (Menurun-Meningkat)			
		1	2	3	4
1.	Semangat Belajar	4 1%	38 10%	156 45%	124 37%
2.	Kecemasan	16 5%	81 25%	114 33%	109 30%
3.	Semangat mengajar guru	0 0%	19 5%	70 20%	136 39%

bahwa UN dapat meningkatkan semangat murid dalam belajar dan semangat guru dalam mengajar dengan persentase 37% dan 39% untuk masing-masing katagori dengan skala 1 sampai 4. Namun demikian diakui juga oleh siswa bahwa UN dapat menimbulkan kecemasan dengan persentase 30% untuk skala 4.

Dari segi tingkat kesukaran soal untuk tiga mata pelajaran utama, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika dapat digambarkan sebagai berikut.

Data di atas menunjukkan, dari tiga

Table 4
Tingkat Kesukaran Soal UN SMA/MA

NO.	MATA PELAJARAN	TINGKAT KESUKARAN (Mudah-Sulit)				
		1	2	3	4	5
1	Bahasa Indonesia	21 6%	88 25%	168 50%	49 14%	8 2%
2	Bahasa Inggris	18 5%	57 16%	143 43%	82 24%	11 3%
3	Matematika	11 3%	22 6%	85 26%	111 32%	89 25%

mata pelajaran, Matematika dirasakan oleh siswa memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi dengan persentase 57% untuk skala 4 dan 5, diikuti oleh Bahasa Inggris dengan persentase 27% dan Bahasa Indonesia dengan persentase 16%.

Sehubungan dengan persiapan menghadapi UN, siswa SMP/MTs yang menjadi responden monitoring melakukan berbagai persiapan sebagaimana digambarkan da-

lam tabel berikut ini.

Tabel 5
Persiapan Siswa SMP/MTs Dalam Menghadapi UN
N = 357

NO	PERSIAPAN	JUMLAH
1	Mengikuti pelajaran tambahan di sekolah/madrasah	353 99%
2	Mengikuti bimbingan belajar	293 82%
3	Membeli buku pelajaran yang diUNkan	304 85%
4	Menambah jam belajar	334 94%

Persiapan yang dilakukan siswa SMP/MTs bervariasi. Mayoritas mereka mengikuti pelajaran tambahan di sekolah/madrasah (99%), menambah jam belajar (94%), dan membeli membeli buku pelajaran yang diujinasionalkan (85%). Namun demikian mayoritas dari mereka juga masih mengikuti bimbingan belajar (82%). Tingginya persentase siswa yang mengikuti bimbingan belajar menunjukkan persiapan yang diberikan guru dan dilakukan oleh siswa dirasakan belum memadai.

Tidak dipungkiri UN juga memiliki dampak psikologis terhadap siswa dan guru seperti digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6
Dampak UN Terhadap Siswa Dan Guru SMP/MTs

NO.	DAMPAK	SKALA			
		1	2	3	4
1.	Semangat Belajar	2 1%	9 3%	116 32%	198 55%
2.	Kecemasan	17 5%	140 39%	127 36%	52 15%
3.	Semangat mengajar guru	0 0%	8 2%	71 20%	173 48%

Bagi siswa, UN dapat meningkatkan semangat belajar mereka sebagaimana dirasakan oleh 55% responden. Bagi guru, UN dapat meningkatkan semangat mengajar sebagaimana dirasakan oleh 48% responden dari guru. Namun demikian diakui juga bahwa UN berdampak pada timbulnya kecemasan di kalangan siswa sebagaimana dirasakan oleh 51% responden pada skala 3 dan 4.

Untuk tingkat kesukaran soal UN SMP/MTs dapat digambarkan sebagai berikut.



Tabel 7
Tingkat Kesukaran Soal UN SMP/MTs

NO.	MATA PELAJARAN	TINGKAT KESUKARAN				
		1	2	3	4	5
1	Bahasa Indonesia	16 4%	79 22%	153 43%	79 22%	19 5%
2	Bahasa Inggris	9 3%	32 9%	147 41%	97 27%	24 7%
3	Matematika	5 1%	47 13%	91 25%	107 30%	78 22%
4	IPA	2 1%	32 9%	67 19%	88 25%	17 5%

Dari empat mata pelajaran di atas, Matematika memiliki tingkat kesukaran soal yang paling tinggi dengan persentase 52% pada skala 4 dan 5, diikuti oleh Bahasa Inggris dengan persentase 34%, IPA dengan persentase 30% dan Bahasa Indonesia dengan persentase 27%.

Kesimpulan dan Saran

BSNP sebagai penyelenggara UN senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan UN. Usaha ini dimaksudkan untuk menjadikan hasil UN lebih obyektif, jujur, dan kredibel. Untuk itu diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak dan masyarakat luas sehingga penyelenggaraan UN yang obyektif, jujur, dan kredibel dapat diwujudkan. Tanpa kerjasama dan komitmen tersebut usaha yang dilakukan oleh BSNP tidak akan optimal.

Matematika memiliki tingkat kesu-

karan soal yang paling tinggi untuk UN SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk itu disarankan kepada guru dan murid untuk memberikan perhatian kepada mata pelajaran Matematika yang merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Diantaranya adalah dengan membuat strategi mengajar yang mudah dimengerti oleh siswa serta dengan memberikan banyak latihan.

Meskipun para siswa sudah melakukan persiapan dengan mengikuti kelas tambahan di sekolah/madrasah dan menambah jam belajar di rumah, mayoritas dari mereka masih mengikuti bimbingan belajar. Artinya mereka masih mengeluarkan biaya tambahan untuk mengikuti bimbingan tersebut. Untuk itu disarankan kepada para siswa untuk lebih percaya diri dengan mengikuti proses belajar mengajar di sekolah dan belajar secara mandiri.

UN memiliki dampak positif kepada siswa dan guru. Bagi siswa UN dapat meningkatkan semangat belajar dan bagi guru dapat meningkatkan semangat mengajar. Dampak psikologis lainnya adalah munculnya kecemasan di kalangan siswa. Namun tingkat kecemasan ini tidak tinggi sehingga malah bisa dijadikan daya pendorong untuk lebih giat belajar. Disarankan bagi siswa dan guru, semangat belajar dan mengajar tersebut hendaknya ditingkatkan bukan hanya karena UN tapi karena untuk menguasai kompetensi yang harus dimiliki. ●

Para pengawas ruang ujian mendengarkan pengarahannya dari penyelenggara UN tingkat satuan pendidikan. Pengarahanannya diberikan setiap pagi sebelum mereka melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan sistem silang antar sekolah/madrasah.

Perkembangan Penyusunan Standar Nasional Pendidikan

Bambang Suryadi

Ada tujuh kegiatan yang menjadi prioritas BSNP pada tahun 2011, yaitu penyempurnaan SKL dan SI, standar sarana dan prasarana program pascasarjana dan profesi, standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi, standar biaya pendidikan tinggi, pengembangan instrumen pemantauan standar pendidikan nonformal, dan evaluasi standar pendidikan tinggi berdasarkan paradigma pendidikan nasional.

Koordinator untuk penyempurnaan SKL adalah Djemari Mardapi, untuk SI adalah Mungin Eddy Wibowo, untuk standar sarana dan prasarana adalah Edy Tri Baskoro, untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi adalah Djaali, untuk standar biaya pendidikan tinggi adalah Zaki Baridwan, untuk instrumen pemantauan standar pendidikan nonformal adalah Jamaris Jamna dan untuk evaluasi standar pendidikan tinggi berdasarkan paradigma pendidikan nasional adalah Farid Anfasa Moeloek.

Setiap hari Selasa, dalam rapat pleno BSNP, masing-masing koordinator kegiatan menyampaikan laporan perkembangan penyusunan standar tersebut. Menurut Muhammad Aman Wirakartakusumah, melalui laporan perkembangan ini dimaksudkan supaya semua anggota BSNP mengetahui perkembangan dan hasil yang sudah dicapai untuk masing-

masing standar serta memberikan masukan dan tanggapan untuk pengembangan standar dimaksud. Hal ini menjadi penting mengingat tidak semua anggota BSNP terlibat secara langsung dalam pengembangan seluruh standar. Sementara di sisi lain, ungkap Aman, anggota BSNP harus mengetahui substansi dan proses pengembangan standar yang sedang berlangsung.

Penyempurnaan SKL dan SI

Menurut Djemari Mardapi dalam pelaksanaan kegiatan penyempurnaan SKL dan SI ada beberapa tahapan kegiatan yang digabungkan supaya antara anggota tim ahli SKL dan tim ahli SI dapat berkomunikasi dan tukar informasi. "Strategi ini sangat penting karena berdasarkan SKL tersebutlah akan dikembangkan menjadi SI. Ada SKL satuan pendidikan, SKL kelompok mata pelajaran, dan SKL mata pelajaran. Masing-masing SKL memiliki turunannya dalam SI", ungkap Djemari.

Sampai berita ini ditulis, tim penyempurnaan SKL dan SI telah melakukan validasi di Surabaya tanggal 19-21 Agustus 2011. Dalam laporannya, Djemari Mardapi menyampaikan kegiatan validasi sangat menarik. Hampir semua tim ahli dan undangan hadir. Tempat kegiatan juga sangat bagus sehingga memudahkan untuk komunikasi dan sinkronisasi antara tim SKL dan tim SI. Hanya satu yang pembahasannya agak lama yaitu PKn.

Sementara Mungin Eddy Wibowo dalam laporannya menyampaikan TIM SKL dan SI

Djemari Mardapi (berbaju batik coklat) dan Mungin Eddy Wibowo (kanan) menyampaikan perkembangan penyempurnaan SKL dan SI dalam rapat pleno BSNP





Dari kiri ke kanan, Baso Intang Sappaile, Abdul Gafur, Hinduan, Gardjito, dan AT Soegito memaparkan draf standar tenaga kependidikan tinggi di BSNP

pada hari pertama masih terpisah untuk menyempurnakan draf. Pada hari kedua, kedua tim menyatu untuk melakukan sinkronisasi. Tim kemudian berpisah lagi untuk melakukan perbaikan masing-masing standar. Kegiatan berakhir pada hari ketiga jam 09.00.

Tim merekomendasikan kepada BSNP untuk mengundang Direktur Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katholik, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Konghucu pada tanggal 13 September 2011 untuk membahas keterlibatannya dalam penyempurnaan SKL dan SI. Uji publik dilaksanakan tanggal 7-9 Oktober 2011. Sebelum uji publik, tepatnya tanggal 27 September 2011, tim ahli yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris mempresentasikan draf SKL dan SI di BSNP.

Standar Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi (Teknisi Sumber Belajar, Laboran, dan Pustakawan)

Koordinator kegiatan ini adalah Djaali. Tim pengembang draf standar tenaga kependidikan terdiri atas tiga kelompok kecil, yaitu tim untuk standar ketenagaan pusat sumber belajar perguruan tinggi, standar pranata laboratorium pendidikan perguruan tinggi, dan standar tenaga perpustakaan perguruan tinggi.

Dari sembilan tahapan kegiatan, sampai berita ini diturunkan, telah terlaksana 6 tahapan, yaitu sampai pada tahap pembahasan dengan unit utama yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Agustus 2011. Sebelum itu, telah dilakukan kegiatan validasi draf standari di enam provinsi, yaitu Jawa Timur (UNESA), Jawa Tengah (UNNES), Sumatera Utara (UNIMED), Sulawesi Selatan (UNM), Jawa Barat (UPI), dan DIY (UNY) dalam rentang waktu dari tanggal 3-8 Juli 2011.

Pada tanggal 9 Agustus 2011, tim ahli yang diwakili oleh AT Soegito, Baso Intang

Sappaile, Abdul Gafur, Hinduan, dan Gardjito mempresentasikan draf standar di BSNP untuk mendapatkan masukan dan saran sebelum dilakukan pembahasan dengan unit utama.

Gardjito dalam presentasinya tentang draf standar pustakawan (Kepala Perpustakaan, Pustakawan, dan Tenaga Teknis) memperkenalkan istilah baru dalam draf tersebut, yaitu istilah pemustaka sebagai sebutan untuk pengguna perputakaan. Sementara Hinduan mempresentasikan draf standar laboratorium dan Abdul Ghafur memaparkan draf standar pusat sumber belajar perguruan tinggi.

Pada akhir presentasi BSNP memberikan apresiasi kepada tim yang telah mengembangkan draf standar *pranata* laboratorium pendidikan perguruan tinggi, standar ketenagaan pusat sumber belajar perguruan tinggi, dan standar tenaga perpustakaan perguruan tinggi dengan beberapa catatan untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan dan penyempurnaan draf standar.

Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi berdasarkan Paradigma Pendidikan Nasional

Sebagai koordinator kegiatan Farid Afansa Moeloek menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah ada empat tahapan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan keempat adalah validasi draf standar dilaksanakan di Semarang pada tanggal 13-15 Agustus 2011.

Menurut Moeloek dari 14 peserta yang diundang, 10 hadir. Sebagian besar memberikan masukan terhadap draf standar. Yang diminta dari reviewer adalah pandangan mereka terhadap gagasan yang tertuang dalam paradigma pendidikan nasional, apakah bisa dipakai sebagai acuan dalam menghadapi perubahan paradigm pendidikan. Selama kegiatan berlangsung telah terjadi diskusi yang sangat intens dan ada pertanyaan yang mengkritisi draf dengan memberikan masukan yang sangat konstruktif.

Pada tanggal 23 Agustus 2011, mewakili tim ahli Imam Buchori Zainuddin mempresentasikan draf evaluasi standar pendidikan tinggi di BSNP. Menurut Buchori pada pertemuan terakhir tim masih membahas konsep dari buku paradigma pendidikan nasional. Ada beberapa perubahan

membaca instrumen sebelum menjawab.

Di akhir presentasi BSNP merekomendasikan kepada tim ahli untuk menyempurnakan instrumen yang ada sebelum digunakan untuk mengumpulkan data yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu dari tanggal 12 sampai dengan 16 September 2011.

Imam Buchori
Zainuddin dan
Terry Mart
mempresentasikan
draf evaluasi
standar
pendidikan tinggi
di BSNP



dalam draf buku meskipun sudah digandakan oleh BSNP secara terbatas. Yang akan dievaluasi adalah standar yang ada di lapangan. Kondisi di lapangan menunjukkan ada beberapa perguruan tinggi yang secara tidak langsung, meskipun standar belum disahkan, sudah melakukan evaluasi. Mereka memiliki kriteria sendiri, termasuk kriteria dari BAN-P.

Lebih lanjut Buchori menjelaskan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi perubahan paradigma pendidikan abad XXI dan kepedulian BSNP tentang perubahan tersebut. “Yang penting adalah kesiapan menghadapi perubahan abad XXI. Jika suasana dan semangat yang ada tidak mendukung perubahan, ini yang bermasalah”, ungkap Buchori seraya menambahkan perubahan paradigma pendidikan dan kehidupan sosial menuntut kemandirian dan kemandirian sebagai konsep penting untuk menghadapi hari depan.

Selain yang bersifat pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, Buchori juga mempresentasikan draf instrumen evaluasi standar pendidikan tinggi. Djemari Mardapi memberikan catatan dalam mengembangkan instrumen harus jelas konstruk yang akan diukur. Dimensi apa yang akan diukur harus jelas supaya hasilnya valid dan reliable. Pertanyaan dalam instrumen ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Hal-hal yang terkait dengan karakter tidak ditanyakan langsung. Selain itu, tambah Djemari, perlu ada cross check dalam instrumen untuk mengetahui apakah responden benar-benar

Standar Sarana dan Prasarana Program Pascasarjana dan Profesi Pendidikan Tinggi

Koordinator kegiatan ini adalah Edy Tri Baskoro. Dalam laporannya, Edy Tri Baskoro menyampaikan pertemuan tim ahli standar sarana dan prasarana program pascasarjana dan profesi yang kelima telah dilaksanakan di Jakarta mulai Jumat sampai dengan Minggu (12-14 Agustus 2011). Agenda utamanya adalah penyempurnaan draf standar berdasarkan hasil validasi.

Validasi draf standar, lanjut Edy Tri Baskoro, dilaksanakan di enam provinsi, yaitu Sumatera Utara (USU), Sumatera Selatan (UNSRI), Jawa Barat (IT TELKOM), Jawa Tengah (UNDIP), DIY (ISI), dan Sulawesi Selatan (UNHAS) pada bulan Juli 2011.

Secara umum, lanjut Edy Tri Baskoro, cukup banyak masukan yang diperoleh dari lapangan yang dapat dikelompokkan dalam dua hal. Pertama komentar tentang keterbacaan standar dan kedua tentang kesesuaian standar. Secara umum draf standar dapat dipahami dan tepat dengan persentasi 80%. Dari hasil validasi, tim mendapat masukan yang sangat konstruktif untuk penyempurnaan draf standar tersebut. Selanjutnya tim akan mempresentasikan draf standar di BSNP tanggal 20 September 2011. Pertemuan selanjutnya adalah pembahasan dengan unit utama pada tanggal 1-3 Oktober 2011 di Jakarta. Dalam kegiatan ini BSNP mengundang 14



Tim ahli standar sarana dan prasarana program pascasarjana dan profesi berpose bersama sebelum membahas draf standar dengan para nara sumber di Surabaya. Solidaritas, kebersamaan, keakraban, dan partisipasi dari tim ahli menjadi kunci utama dalam pengembangan standar.

orang. Mereka meliputi unsur DIKTI, Biro Hukum, Kemenag, Kopertis, Kopertais, dan asosiasi profesi.

Standar Biaya Pendidikan Tinggi

Sebagai koordinator kegiatan adalah Zaki Baridwan. Pada saat laporan ini ditulis, pelaksanaan kegiatan sudah sampai tahap validasi. Kegiatan validasi ini dilaksanakan di enam perguruan tinggi di delapan provinsi, yaitu DKI, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Menurut Zaki Baridwan standar biaya yang dikembangkan adalah unit cost per mahasiswa per tahun untuk program sarjana (S1) pada program studi tertentu. Standar biaya ini, lanjut Zaki Baridwan, dibatasi pada biaya operasional sedangkan biaya investasi dan biaya personal tidak distandarkan.

Menurut Mansur Ma'shum ketua tim ahli, ada dua puluh delapan jenis aktifitas yang dihitung biayanya. Aktifitas tersebut adalah renstra, RKT, evaluasi diri, pelaporan, penjaminan mutu, kemahasiswaan, promosi, seleksi calon mahasiswa, registrasi, kurikulum dan silabus, orientasi mahasiswa, penyusunan kalender akademik, penyusunan jadwal kuliah, perencanaan kuliah, perkuliahan, kuliah umum/dosen tamu, perpustakaan, praktikum, praktek lapangan, KKN, tugas akhir, yudisium, wisuda, pemeliharaan, keamanan, asuransi, pelayanan kesehatan, dan aktifitas umum.

Hasil validasi telah selesai dianalisis oleh tim ahli dan akan dimanfaatkan untuk penyempurnaan draf standar.

Pengembangan Instrumen Pemantauan Standar Pendidikan Nonformal

Koordinator kegiatan ini adalah Jamaris Jamna. Dalam laporannya, Jamaris menga-

takan sampai saat ini sudah sampai pada tahapan kelima, yaitu validasi draf instrumen pemantauan pendidikan nonformal. Kegiatan validasi dilaksanakan dalam rentang waktu dari tanggal 14-19 Agustus 2011 di enam provinsi, yaitu Jawa Tengah (P2PNFI), Jawa Barat (P2PNFI), Sumatera Utara (BPPNFI), Jawa Tengah (BPPNFI), Kalimantan Barat (BPKB), dan Bali (BPKB).

Berdasarkan masukan dari validasi tersebut, lanjut Jamaris, tim ahli akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan draf instrumen pemantauan standar pendidikan nonformal. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta.



Peserta validasi draf standar biaya pendidikan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka terdiri atas wakil dekan bidang administrasi umum, ketua jurusan, kepala satuan pengawas intern, dan tim BLU.

Memperhatikan laporan perkembangan penyusunan standar sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengembangan standar berjalan sesuai dengan perencanaan awal dan diharapkan akan selesai sesuai dengan perencanaan semula. Amin. ●

Kepala Balitbang
Kementerian
Pendidikan
Nasional
Khairil Anwar
Notodiputro
(kiri) didampingi
Burhanuddin
Tola Sekretaris
Balitbang
mendiskusikan
tentang standar
nasional
pendidikan dan
Ujian Nasional di
BSNP



BALITBANG DAN BSNP BERSINERGIS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional Khairil Anwar Notodiputro yang baru dilantik pada 25 Juli 2011 yang lalu, mengadakan audiensi dengan anggota BSNP di ruang sidang BSNP pada hari Selasa (9/8/2011) untuk mensinergikan kegiatan BSNP dan Balitbang. "Selain silaturahmi, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang ada di Balitbang dan kegiatan BSNP terutama yang terkait dengan pengembangan standar nasional pendidikan dan penyelenggaraan Ujian Nasional" ungkap Khairil Anwar yang didampingi oleh Burhanuddin Tola Sekretaris Balitbang dan Hari Setiadi Kepala Puspendik serta beberapa staf Puspendik.

Sebagai pertemuan pertama, lanjut Khairil Anwar, Balitbang memberikan apresiasi kepada BSNP yang telah memberikan informasi tentang tugas dan wewenang BSNP. Dukungan Balitbang kepada BSNP menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi.

Ketua BSNP Moehammad Aman Wira-kartakusumah menyambut baik niat Kepala Balitbang yang notabene mantan Direktur Pascasarjana IPB. "Pertemuan ini merupakan kesempatan yang baik untuk mensinkronkan kegiatan BSNP dengan program kerja di Balitbang" ungkap Aman.

Melalui pertemuan ini, tambah Aman diharapkan Kepala Balitbang bisa menjembatani antara BSNP dan Menteri Pendidikan Nasional

terkait dengan draf standar yang telah selesai dikembangkan oleh BSNP namun belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. "BSNP sudah mengusulkan beberapa draf standar tersebut sejak tiga tahun yang lalu, tapi belum ada produk yang ditetapkan menjadi Permendiknas", ungkap Aman seraya menambahkan keberadaan standar sangat ditunggu di lapangan terutama yang terkait dengan pembukaan program studi, pembukaan perguruan tinggi, dan akreditasi.

Tentang draf standar pendidikan yang belum dijadikan Permen, menurut Khairil Anwar, perlu dilihat apakah ada permasalahan. Intinya Balitbang mendukung produk yang dihasilkan BSNP untuk segera diproses menjadi ketetapan Mendiknas.

Sementara Burhanuddin Tola Sekretaris Balitbang menyatakan selama ini Balitbang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan BSNP dengan menyediakan sumber daya manusia atau staf untuk sekretariat dan keuangan. Namun perlu juga dievaluasi, sejauh mana tenaga yang disediakan Balitbang mendukung kinerja BSNP.

Untuk memperbaiki mutu penyelenggaraan UN, Balitbang bersama BSNP akan menyelenggarakan lokakarya pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2011. Diharapkan dari lokakarya ini penyelenggaraan UN pada masa depan dapat ditingkatkan. ●

HASIL PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN TAHAP I

BSNP bekerjasama dengan Puskurbuk melakukan penilaian buku teks pelajaran tahap I dari tanggal 21-22 Agustus 2011 di Jakarta. Menurut Weinata Sairin anggota BSNP ada empat aspek yang dinilai untuk menetapkan buku tersebut layak atau tidak untuk dijadikan buku teks pelajaran. "Empat aspek yang dinilai adalah kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan" ungkap Weinata Sairin sebagai koordinator kegiatan tersebut.

Hasil penilaian tersebut dipaparkan kepada

anggota BSNP dalam rapat pleno (23/8/2011) untuk mendapatkan masukan dan saran. Urip anggota tim ahli penilaian buku dalam paparannya menjelaskan penilaian tahap I dilakukan dalam dua kesempatan. Pertama, dilakukan oleh ahli materi dan ahli pembelajaran. Proses penilaian dilakukan dengan memberikan angka sesuai dengan deskripsi yang ada. Kedua, penilaian berbentuk komentar dari penilai terhadap masing-masing butir yang ada di dalam instrumen. "Dengan demikian ada dua

Berita BSNP

data hasil penilaian, yaitu kuantitatif dan kualitatif, ungkap Urip seraya menambahkan dengan cara seperti ini buku yang diloloskan memiliki mutu yang baik.

Dari 832 buku teks pelajaran yang dinilai, sebanyak 429 (51,56%) yang direkomendasikan untuk dinilai pada tahap II oleh guru. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kelayakan penyajian dan kelayakan bahasa, serta kelayakan kegrafikaan.

Lebih lanjut tim ahli memberikan beberapa

usulan perbaikan langkah penilaian buku teks pelajaran, yaitu (a) Penilaian Tahap II, (b) Review penilaian kualitatif oleh tim Pengembang, (c) Rapat pleno (1) BSNP, (d) Workshop dan feedback kepada penulis untuk perbaikan, dan (e) Review oleh tim pengembang terhadap buku hasil perbaikan.

BSNP setelah memperhatikan pemaparan dan hasil penilaian tahap I merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian POS khusus untuk buku yang memiliki sub-mapel. ●



Tim dari Pusurbuk Kementerian Pendidikan Nasional memaparkan hasil penilaian buku teks pelajaran tahap I di BSNP

VALIDASI DRAF STANDAR SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PASCASARJANA DAN PROFESI

BSNP menyelenggarakan validasi draf standar sarana dan prasarana program pascasarjana dan profesi pendidikan tinggi di enam provinsi pada bulan Juli 2011. Enam provinsi yang menjadi tempat kegiatan validasi serta lembaga partner penyelenggara adalah Jawa Barat (IT Telkom), Daerah Istimewa Yogyakarta (Institut Seni Indonesia), Sulawesi Selatan (Universitas Hasanuddin), Sumatera Selatan (Universitas Sriwijaya), Sumatera Utara (Universitas Sumatera Utara), dan Jawa Tengah (Universitas Diponegoro). Di setiap provinsi ada tiga nara sumber dengan komposisi

seorang anggota BSNP dan dua orang tim ahli pengembangan standar. Dalam hal anggota BSNP tidak dapat hadir, maka diwakili oleh tim ahli.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan **kriteria minimal** tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang



Tim ahli dan nara sumber mendiskusikan draf standar sarana dan prasarana program pascasarjana dan profesi pendidikan tinggi. Masukan dari nara sumber diakomodasi untuk penyempurnaan draf standar tersebut.

proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Edy Tri Baskoro anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator kegiatan, tujuan validasi ini adalah untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap draf standar tersebut dari dua aspek, yaitu keterbacaan dan kesesuaian standar. Aspek keterbacaan yang diukur adalah apakah draf standar tersebut mudah atau sulit untuk dipahami dari segi penggunaan bahasa atau istilah. Sedangkan aspek kesesuaian standar yang diukur adalah apakah draf tersebut terlalu tinggi, sudah sesuai, atau terlalu rendah untuk dipenuhi oleh perguruan tinggi penyelenggara program pascasarjana dan profesi.

Untuk mencapai tujuan di atas, di setiap provinsi BSNP mengundang tiga puluh peserta validasi. Mereka mewakili perguruan tinggi negeri dan swasta serta rumpun dan bidang keilmuan

tertentu. Ada tiga rumpun keilmuan yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu budaya. Ilmu alam meliputi kedokteran/kesehatan, pertanian, MIPA, teknik, dan komputer. Ilmu sosial meliputi ekonomi, pendidikan, dan sosial lainnya (hukum, psikologi, soshol dll). Ilmu budaya meliputi seni/desain dan humaniora (keagamaan, sastra, sejarah dll).

Kegiatan validasi di setiap provinsi diawali dengan presentasi tentang standar nasional pendidikan oleh anggota BSNP. Kemudian tim ahli memaparkan draf standar sarana dan prasarana program pascasarjana dan profesi. Usai pemaparan, peserta validasi diberi waktu untuk membaca draf standar selama kurang lebih 30 menit. Pada saat yang bersamaan mereka mengisi instrumen validasi. Selanjutnya peserta memberikan pandangan umum terhadap draf standar. Sedangkan tim ahli merangkum seluruh hasil validasi untuk dijadikan bahan dalam kegiatan pengembangan standar berikutnya. ●

Peserta evaluasi pelaksanaan UN tahun pelajaran 2010/2011 antusias menyampaikan pandangan dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan UN di masa mendatang



EVALUASI PELAKSANAAN UN DI PROVINSI JAMBI DAN SULAWESI SELATAN

Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2010/2011 pada pertengahan Agustus yang lalu. Dalam hal ini BSNP mengutus Teuku Ramli Zakaria ke Provinsi Jambi dan Djaali ke Provinsi Sulawesi Selatan. Selain dari BSNP, Kepala Puspendik Hari Setiadi juga hadir dalam acara tersebut.

Menurut Ramli Zakaria peserta yang diundang dalam evaluasi tersebut adalah para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota di Jambi. Sebagai nara sumber, dalam paparannya Ramli Zakaria lebih banyak menekankan tentang POS UN sebagai acuan penyelenggaraan UN. Sedangkan Hari Setiadi dalam presentasinya menekankan pada hasil UN.

Selama acara berlangsung, tambah Ramli Zakaria, sebagian peserta menganggap tidak diperlukan UN karena terjadi banyak kecurangan. Sebagian yang lain menyampaikan bahwa Permendiknas dan POS tentang UN selalutertlambat

diterima di lapangan. "Keterlambatan sosialisasi Permendiknas dan POS UN ini karena belum ada keputusan dari DPR", ungkap Ramli Zakaria seraya menambahkan BSNP dari tahun ke tahun selalu melakukan perbaikan. Pada tahun 2011 perbaikan yang dilakukan adalah dengan memasukkan komponen ujian sekolah. Setelah mendapat penjelasan dari kedua nara sumber, para peserta dapat menerima pentingnya dilaksanakan UN.

Dari Makassar, Djaali melaporkan materi yang disampaikan menekankan pada amanat undang-undang tentang penyelenggaraan UN dan pengendalian UN. "Undang-undang tentang Sisdiknas memberikan amanat kepada BSNP untuk menyelenggarakan UN. Dalam menyelenggarakan UN, BSNP bekerjasama dengan Puspendik, Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi Negeri. Pengendalian UN yang bisa ditangani oleh BSNP masih terbatas pada penyelenggaraan UN di Kabupaten/Kota" ucap

Djaali.

Untuk penyelenggaraan UN di sekolah/madrasah, lanjut Djaali, sulit dikendalikan BSNP. Dalam hal ini BSNP bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri untuk melakukan pengawasan di sekolah/madrasah.

Pada akhir acara para peserta evaluasi pelaksanaan UN di Jambi dan Sulawesi Selatan sepakat untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan UN tahun lalu. Masalah utama di lapangan adalah banyak sekolah yang kekurangan guru. ●



PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNPP

Peserta UNPP di NTB mengerjakan soal ujian dengan serius. Suasana UNPP lebih rileks dibanding peserta UN formal, terutama dalam hal pakain sebagaimana tampak dalam gambar

BSNP telah menyelenggarakan Ujian Nasional Program Paket (UNPP) periode I dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Juli 2011 untuk UN Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan, tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2011 untuk UN Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha. Sedangkan untuk periode II, dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober 2011 untuk UN Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan, dan tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober 2011 untuk UN Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha.

Selama pelaksanaan UNPP, BSNP melakukan pemantauan untuk memastikan UNPP dilaksanakan sesuai dengan POS. Anggota BSNP menyampaikan hasil pemantauan tersebut dalam rapat pleno setiap hari Selasa.

Berdasarkan hasil pemantauan Djemari Mardapi mengatakan pelaksanaan UNPP yang disamakan dengan pelaksanaan ujian formal mendapat sambutan positif, tetapi jika kriteria kelulusan disamakan dengan kriteria kelulusan ujian formal banyak warga yang keberatan. Selain itu, dengan ijazah Paket C peserta berharap dapat diterima di perguruan tinggi swasta sedangkan dengan Ijazah Paket B peserta berharap dapat diterima sebagai aparatur desa (Kepala Desa).

Mungin Eddy Wibowo yang memantau UNPP di NTB mengatakan sebagian pengawas ruang ujian dari mahasiswa. Secara umum tidak terjadi persoalan yang krusial selama pelaksanaan UNPP.

Di Gorontalo sebagaimana dilaporkan oleh Gunawan Indrayanto hampir di semua kabupaten/kota ketidakhadiran peserta UNPP mencapai 20 persen. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang terlalu cepat dengan waktu pelaksanaan. Temuan lainnya adalah pengawasan di ruang ujian yang kurang serius.

Kerjasama antar peserta dibiarkan oleh pengawas dan ada peserta yang main HP saat ujian.

Ketidakhadiran peserta ujian sebagaimana dilaporkan oleh Farid Afansa Moeloek karena mereka masih bekerja dan tidak mendapat izin dari tempat kerja. Untuk mengatasi masalah ini, Moeloek mengusulkan supaya ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja sehingga peserta ujian yang kerja bisa ikut UNPP. Selain itu waktu ujian diusulkan sama dengan formal, yaitu pada pagi hari. Meskipun usia peserta ujian sudah menginjak dewasa tetapi semangat mereka luar biasa.

Menurut Moehammad Aman Wirakartakusumah yang memantau di Jawa Barat, peserta UNPP dari mereka yang tidak lulus UN formal sangat sedikit. Hal ini karena tingkat kelulusan yang tinggi pada UN yang kriteria kelulusannya merupakan penggabungan antara nilai sekolah dan nilai UN.

Weinasa Sairin yang memantau UNPP di DKI sempat mengunjungi tiga tempat. Salah satunya di Pondok Pesantren Al Islah di tepi TPU Tanah Kusir. Ujian dilaksanakan di masjid sehingga suasana berbeda dengan suasana sekolah. Tidak sangat ketat sebagaimana ujian formal. Yang terjadi seperti *sharing* saja.

Lebih lanjut Weinata mengungkapkan ada masalah psikologis terutama peserta dari *Home Schooling*. Pertanyaannya, mereka yang ikut *home schooling* ini apa karena mereka tidak punya waktu untuk sekolah di formal atau ada alasan lain.

Pelaksanaan UNPP secara umum kurang serius dan terdapat penyimpangan dari POS UNPP. Misalnya peserta ujian saling bekerjasama tetapi dibiarkan oleh pengawas. Untuk perbaikan pelaksanaan UNPP ke depan diperlukan kerjasama antara Kemendiknas atau BSNP dengan Kementerian Tenaga Kerja. ●



Suasana rapat koordinasi penyelenggaraan UN di Jakarta. Rapat dihadiri oleh anggota BSNP, Puspendik, Direktorat terkait di Kemdiknas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Ketua Penyelenggara UN Tingkat Provinsi



Moehammad Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (lajur kanan sebelah kiri) bersama anggota BSNP memaparkan kebijakan Ujian Nasional di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah di Senayan



Penyelenggara UN tingkat satuan pendidikan bersiap siaga sebelum ujian dimulai untuk memastikan ujian dilaksanakan secara jujur, adil, kredibel, dan akuntabel



Peserta UN SMA mendengarkan pengarahan dari pengawas ruang sebelum menjawab soal ujian



Peserta UNPP mengerjakan soal ujian dengan serius. Mayoritas peserta UNPP adalah dari kalangan putus sekolah dan pekerja



Rapat evaluasi penyelenggaraan UN di BSNP. Rapat dihadiri oleh anggota BSNP, Puspendik, Direktorat terkait di Kemdiknas dan Kemenag



Fasli Jalal Wakil Menteri Pendidikan Nasional (kiri) berbincang dengan Ketua dan anggota BSNP seputar Ujian Nasional



Suasana lengang dan sepi saat pelaksanaan UNSD di SDN Bali dan SDN Timor Makassar



Dalam suasana yang khidmat dan sederhana Anggota BSNP melakukan doa bersama dalam rangka hari jadi atau ulang tahun salah satu anggota BSNP (Farid Anfasa Moeloek, nomor dua dari kanan). Semoga panjang umur dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Kunjungi Website kami di:

<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605



770126 460552